

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH
MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI



FRIDOMA YULIANTORO

NIM. B1013141025

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK**

2021

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH
MINIMUM TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

SKRIPSI

**Skripsi Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan**

OLEH :



FRIDOMA YULIANTORO

NIM. B1013141025

**PROGRAM STUDI ILMU EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
PONTIANAK
2021**

PERNYATAAN BEBAS DARI PLAGIAT

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Fridoma Yuliantoro
NIM : B1013141025
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah
Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten
/ Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi dengan judul tersebut di atas, secara keseluruhan adalah murni karya penulis sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sebagai sumber pustaka sesuai dengan Pedoman Penulisan Karya Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Tahun 2019 (lembar hasil pemeriksaan plagiat terlampir).

Apabila di dalamnya terdapat kesalahan dan kekeliruan maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis yang dapat berakibat pada pembatalan gelar keserjanaan di Universitas Tanjungpura.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pontianak, 23 Juni 2021

Fridoma Yuliantoro

B1013141025

PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Fridoma Yuliantoro
NIM : B1013141025
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Sumber Daya Manusia
Judul Skripsi : Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah
Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten
/ Kota Di Provinsi Kalimantan Barat

Menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Pontianak, 23 Juni 2021

Fridoma Yuliantoro

B1013141025

LEMBAR YURIDIS

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat

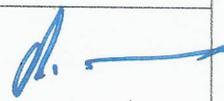
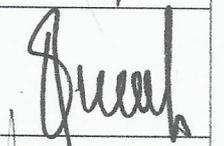
Penanggung Jawab Yuridis



Fridoma Yuliantoro
B1013141025

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Program Studi : Ekonomi Pembangunan
Tgl Ujian Tugas Akhir (TA) : 23/06/2021

Majelis Penguji

No.	Majelis Penguji	Nama/NIP	Tgl/bln/thn	Tanda Tangan
1	Ketua Penguji	Muz'an Sulaiman, S.E, M.M, CIQaR	12 / 06 / 2023	
		NIP. 196108241987031003		
2	Penguji 1	Dr. Jumhur, S.E., M.Si	13 / 06 / 2023	
		NIP. 196709281997021001		
3	Penguji 2	Dr. Rosyadi, SE, M.Si, CIQaR	12 / 06 / 2023	
		NIP. 196509211993031001		

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus
Dalam Ujian Tugas Akhir (TA)

Pontiana **23 JUN 2023**
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan

Nurul Bariyah, SE, M.Si., ph.D.
NIP. 196912011994032004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga pembuatan skripsi dengan judul “ Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat” ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan dalam kurikulum Jurusan Ekonomi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Bisnis Universitas Tanjungpura Pontianak.

Selama proses penyelesaian penulisan skripsi ini banyak ditunjang dengan bantuan tenaga, pemikiran baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Dr. Barkah SE, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Tanjung pura Pontianak.
2. Ibu Nurul Bariyah, S.E, M.Si, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
3. Ibu Dr. Sri Kurniawati, S.E, M.Sc selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
4. Ibu Dr. Erni Panca Kurniasih, S.E, M.Si selaku Ketua Prodi Jurusan Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura.
5. Bapak Dr. Jumbuh, SE, M.Si selaku Ketua PPAPK dan dosen penguji Pertama yang banyak membantu dan memberikan bimbingan, dan pengarahan kepada penulis secara sabar untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Muz'an Sulaiman, SE, MM, CIQaR selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan nasehat serta bimbingan hingga akhir skripsi ini baik berupa ide dan juga saran.

7. Bapak Dr. Rosyadi, SE, M.Si, CIQaR selaku Dosen Penguji Kedua yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan petunjuk, bimbingan, dan bantuan hingga akhir penulisan skripsi ini.
8. Bapak, Ibu Dosen serta staf akademik dan seluruh civitas di lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung pura.
9. Orang tua dan saudara tercinta yang selalu memberikan semangat, dorongan, serta perhatian dalam memotivasi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Para sahabatku dan teman-temanku seangkatan yang selalu bersama-sama menghadapi, dan memberi semangat dalam berbagai suka duka selama kuliah dan menyelesaikan skripsi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dan dukungan.

Akhir kata, penulis berharap agar tugas akhir ini bermanfaat bagi semuanya. Penulis juga berusaha dalam mengerjakan tugas akhir ini sehingga tidak menutup adanya pengembangan lebih lanjut dari sistem yang dibuat dalam tugas akhir ini. Oleh karenanya saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Pontianak, 23 Juni 2021

Fridoma Yuliantoro

B1013141025

***THE INFLUENCE OF ECONOMIC GROWTH AND MINIMUM WAGES
ON DISTRICT/CITY POVERTY IN WEST KALIMANTAN PROVINCE***

FRIDOMA YULIANTORO

NIM. B1013141025

ABSTRACT

This study aims to determine the effect of economic growth and minimum wages on poverty in districts / cities in the province of West Kalimantan. The method used in this study is panel data (pooled data) using data from 14 districts or cities in West Kalimantan. The results of hypothesis testing using Random Effect Model analysis which explains Economic Growth and Minimum Wage and one dependent variable (Poverty) indicate that Economic Growth has a positive and significant effect on Poverty and the Minimum Wage has a positive and significant effect on Poverty

Keywords: Economic Growth, Minimum Wage and Poverty

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI DAN UPAH MINIMUM
TERHADAP KEMISKINAN KABUPATEN / KOTA
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

FRIDOMA YULIANTORO

NIM. B1013141025

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel (*pooled data*) dengan menggunakan data 14 Kabupaten atau Kota yang ada di Kalimantan Barat. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis *Random Effect Model* yang menjelaskan Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum serta satu variabel dependen (Kemiskinan) menunjukkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan

Kata Kunci: Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum dan Kemiskinan

RINGKASAN SKRIPSI

Skripsi ini berjudul “Pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum terhadap kemiskinan pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat” dalam pembalasan ini bertujuan untuk mengetahui menganalisis pengaruh Pertumbuhan ekonomi dan Upah Minimum terhadap kemiskinan pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Keterbatasan penelitian ini adalah rentang waktu yang relatif pendek yang membuat data tidak maksimal sehingga data yang di tampilkan belum maksimal menjelaskan bahwa ada beberapa kabupaten yang mengalami penurunan angka kemiskinan salah satunya seperti di Kabupaten Landak pada tahun 2015 presentase kemiskinan di daerah tersebut sebesar 13,51 persen turun menjadi 11,47 persen pada tahun 2019 dan itu terus menurun pada setiap tahunnya. Sedangkan untuk di kota Pontianak dan Kabupaten lainnya mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai pada tahun 2019. dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dari 4,81 persen menjadi 5,03 persen akan tetapi pada tahun 2017 mengalami sspenurunan sebesar 5,00 persen kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 5,17 persen . Meskipun ada beberapa penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota seperti pada Kabupaten Kapuas hulu yaitu 4,67 persen di tahun 2015 menjadi 4,03 persen di tahun 2019 dan Kota Singkawang yaitu sebesar 6,18 di tahun 2015 menjadi 4,53 di tahun 2019, Upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan tingkat upah, pada tahun 2015 upah terbesar berada di Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 1.800.000 sedangkan upah terendah terdapat pada Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 1.575.000. Untuk keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tingkat upah mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

Rumusan Masalah

Pernyataan Masalah

Jika upah minimum meningkat maka daya konsumsi masyarakat akan meningkat, hal ini secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dapat mengurangi persentase angka kemiskinan. Penghasilan dalam hal ini adalah upah yang didapatkan setiap individu / pekerja, sehingga dapat menambah pendapatan yang diperlukan dalam kehidupan sehari- hari untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Secara keseluruhan pendapatan per kapita yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan seseorang ataupun masyarakat.

Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di jelaskan dan di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan pada kerangka teori maka hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut

1. Upah Minimum berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh dan signifikan terhadap Kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat

Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan dikarenakan sehingga Hipotesis Diterima dikarenakan Suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai sebelumnya. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat maka dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan ekonomi karena semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi menggambarkan bahwa semakin meningkatnya jumlah barang dan jasa sehingga semakin tinggi pula produktivitas faktor produksi dan upah yang diterima oleh pekerja dan Upah Minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kemiskinan sehingga Hipotesis Diterima dikarenakan Hal ini terjadi karena sektor terbesar yang mendukung perekonomian di Kota atau Kabupaten Kalimantan Barat lebih banyak sektor pertanian, jasa, dan diikuti oleh perdagangan, dimana sektor pertanian dan jasa adalah sektor informal. Pada sektor informal masih belum bisa mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota atau Kabupaten Kalimantan Barat.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepala Daerah atau Pimpinan yang ada di Kota atau Kabupaten Kalimantan Barat diharapkan lebih memperhatikan faktor-faktor lain dari kedua variabel tersebut, karena dalam penelitian ini kedua variabel berpengaruh terhadap kemiskinan sehingga harus lebih ditingkatkan kembali dalam hal menurunkan tingkat kemiskinan, hendaknya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat diimbangi dengan pemerataan pembangunan yang berorientasi pada pemerataan pendapatan serta pemerataan hasil-hasil ekonomi keseluruhan golongan masyarakat, serta dilakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan dukungan pemerintah dalam penentuan upah minimum juga dirasakan perlu agar nantinya dapat mengurangi kemiskinan. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,041, hal ini menunjukkan bahwa persentase

perubahan Kemiskinan mampu dijelaskan oleh Pertumbuhan Ekonomi dan Upah Minimum sebesar 4,1 % sedangkan sisanya sebesar 95,90% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini seperti Variabel Inflasi, Investasi dan lain-lain

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	ii
PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI	iii
LEMBAR YURIDIS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	vii
ABSTRAK	viii
RINGKASAN SKRIPSI	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	1
1.2	Rumusan Masalah	6
	1.2.1 Pernyataan Masalah	6
	1.2.2 Pertanyaan Masalah	6
1.3	Tujuan Penelitian	6
1.4	Kontribusi Penelitian	6
	1.4.1 Kontribusi Teoritis	7
	1.4.2 Kontribusi Praktis	7
1.5	Gambaran Kontekstual	7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Landasan Teori	8
	2.1.1 Kemiskinan	8
	2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi	12
	2.1.3 Upah Minimum	17
2.2	Hubungan Antar Variabel	21
2.3	Kajian Empiris	22
2.4	Kerangka konseptual dan hipotesis	24

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1	Bentuk Penelitian	26
3.2	Tempat dan Waktu Penelitian	26
3.3	Data	26
3.4	Variabel Penelitian	27
3.5	Metode Analisis	28

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1	Hasil penelitian	32
4.1.1	Statistik Deskriptif	32
4.1.2	Uji Asumsi Klasik	33
4.1.3	Pemilihan Model Linier Regresi Data Panel	35
4.1.3	Analisis Regresi Berganda.....	36
4.1.3	Pengujian Uji Statistik	38
4.2	Pembahasan	40
4.2.1	Petumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan	40
4.2.2	Upah Minimum Terhadap Kemiskinan	41

BAB IV : PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	43
5.1	Rekomendasi	44

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2019	3
Tabel 1.2	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2019.....	4
Tabel 1.3	Upah Minimum Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 - 2019.....	5
Tabel 4.1	Data Deskriptif.....	32
Tabel 4.2	Uji Normalitas.....	34
Tabel 4.3	Uji Multikolinieritas.....	34
Tabel 4.4	Uji Heteroskedastisitas Glesjer	35
Tabel 4.5	Hasil Uji Chow dan Uji Hausman	36
Tabel 4.6	Hasil Regresi Berganda Dengan <i>Model Fixed Effect Cross Section Weight</i>	37
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Uji t Statistik.....	38
Tabel 4.8	Hasil Uji F Statistik.....	39
Tabel 4.9	Hasil Koefisien Determinasi (R^2)	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Kerangka Pemikiran	24
------------	--------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan ialah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum (Mudrajad Kuncoro, 1997). Hidup dalam kemiskinan bukanlah semata-mata hidup dalam kekurangan uang dan tingkat pendapatan yang rendah, melainkan juga banyak hal lain yang terkait, seperti tingkat kesehatan dan pendidikan yang rendah. Kemiskinan di bagi menjadi empat jenis yaitu : (1) Kemiskinan Absolut yaitu suatu kondisi kekurangan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk hidup dan bekerja karena memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan. (2) Kemiskinan Relatif yaitu ketimpangan pendapatan akibat pengaruh kebijakan pembangunan yang belum terealisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. (3) Kemiskinan Kultural yaitu faktor budaya masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki kehidupan meskipun ada bantuan dari pihak luar. (4) Kemiskinan Struktural yaitu situasi rendahnya akses sumber daya dalam suatu sistem sosial budaya dan sosial politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan (Suryawati, 2005).

Apabila dilihat berdasarkan jangka waktu, kemiskinan bisa dibedakan menjadi empat, yaitu (1) *Persistent proverty*, ialah kemiskinan yang kronis atau turun menurun ; (2) *Cyclical poverty*, ialah kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan; (3) *Seasonal poverty*, ialah kemiskinan musiman yang biasa terjadi pada sektor kelautan dan pertanian; dan (4) *Accident poverty*, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh terjadinya bencana alam, konflik, dan kekerasan, atau dampak dari suatu kebijakan tertentu yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat (Sastramadja, 2003). Menurut Badan Pusat Statistik (2000) faktor utama penyebab kemiskinan terutama karena faktor alamiah. Seseorang menjadi miskin karena mereka dilahirkan dari keluarga miskin. Kemiskinan menyebabkan mereka tidak hanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga tidak mampu

mengembangkan status sosialnya. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan mata rantai yang bila tidak diputus akan menyebabkan kemiskinan tersebut selalu ada. Strategi pembangunan yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia selama ini adalah bertumpu pada perolehan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan upah masyarakat dalam menanggulangi permasalahan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang dianggap tinggi tersebut ternyata tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan pada semua golongan masyarakat sehingga terjadi ketimpangan antara pertumbuhan dari sektor ekonomi dan pemerataan di masyarakat.

Di Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan bangsa, di mana hingga sekarang masih belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan tahun 2009 tercatat masih cukup besar yakni, sebesar 32,5 juta jiwa atau lebih kurang 14,2 persen. Kondisi masyarakat yang hidup dalam ruang lingkup kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat dalam menjalankan suatu perekonomian.

Pemerintah pusat maupun daerah telah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Dari hasil penanggulangan kemiskinan di daerah tersebut dan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 bahwa, Kalimantan Barat merupakan salah satu provinsi di pulau kalimantan yang memiliki angka kemiskinan paling tinggi di banding provinsi kalimantan yang lain. Pada tahun 2019 persentase kemiskinan di Kalimantan Tengah sebesar 4,98 persen, Kalimantan Selatan sebesar 4,55 persen, Kalimantan Timur sebesar 5,94 persen, Kalimantan Utara sebesar 6,63 persen sedangkan untuk Kalimantan Barat sebesar 7,49 persen. Untuk di Kabupaten / Kota Kalimantan Barat cenderung berfluktuatif. Berikut data untuk persentase kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang dapat di lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Persentase Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015-2019

Kabupaten / Kota	Persentase Kemiskinan (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	9,42	8,54	8,59	8,55	8,19
Bengkayang	6,94	7,46	7,51	7,17	6,96
Landak	13,51	12,32	12,23	11,77	11,47
Mempawah	5,52	5,75	5,94	5,61	5,32
Sanggau	4,57	4,51	4,52	4,67	4,57
Ketapang	11,72	10,99	11,02	10,93	10,54
Sintang	9,33	10,07	10,20	10,35	9,65
Kapuas Hulu	9,66	9,82	9,45	9,60	9,62
Sekadau	6,50	6,14	6,46	6,17	6,11
Melawi	12,57	12,63	12,54	12,83	12,38
Kayong Utara	9,84	10,19	9,89	10,08	9,98
Kubu Raya	5,22	5,04	5,26	5,07	4,74
Kota Pontianak	5,22	5,55	5,31	5,00	4,88
Kota Singkawang	5,76	5,33	5,42	5,12	4,91
Kalimantan Barat	8,03	7,87	7,88	7,77	7,49

Sumber: BPS Kota Pontianak 2019

Berdasarkan pada Tabel 1.1 pada tahun 2015 - 2019 persentase kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat, ada beberapa kabupaten yang mengalami penurunan angka kemiskinan salah satunya seperti di Kabupaten Landak pada tahun 2015 presentase kemiskinan di daerah tersebut sebesar 13,51 persen turun menjadi 11,47 persen pada tahun 2019 dan itu terus menurun pada setiap tahunnya. Sedangkan untuk di kota Pontianak dan Kabupaten lainnya mengalami fluktuatif dari tahun 2015 sampai pada tahun 2019. Dapat dilihat dari tahun 2015 angka kemiskinan di Kota Pontianak sebesar 5,22 persen dan mengalami kenaikan 5,55 persen di tahun 2016 dan penurunan di tahun 2019 menjadi 4,88 persen. Angka kemiskinan juga di pengaruhi oleh rendahnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan keadaan ekonomi dalam suatu negara di jenjang periode tertentu, bisa tahunan, semester, maupun triwulanan. Pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat dapat mempengaruhi angka kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Mengenai hal tersebut data Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat dapat kita lihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2
Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten / Kota di Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2015 – 2019

Kabupaten / Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
	2015	2016	2017	2018	2019
Sambas	4,78	5,24	5,13	5,10	4,89
Bengkayang	3,96	5,15	5,66	5,37	5,23
Landak	5,11	5,28	5,21	5,12	5,01
Mempawah	5,60	5,99	5,93	5,87	5,81
Sanggau	3,15	5,34	4,50	4,47	4,30
Ketapang	5,53	7,97	7,21	7,99	6,72
Sintang	4,65	5,28	5,33	5,47	5,09
Kapuas Hulu	4,67	5,28	5,39	5,23	4,03
Sekadau	5,75	5,93	5,85	5,88	4,49
Melawi	4,61	4,75	4,79	5,44	4,97
Kayong Utara	5,03	5,98	5,42	5,02	5,04
Kubu Raya	6,21	6,37	6,56	5,49	5,82
Pontianak	4,84	5,08	5,05	5,03	4,81
Singkawang	6,18	5,17	5,42	4,71	4,53
Kalimantan Barat	4,81	5,03	5,00	5,06	5,17

Sumber: BPS Pontianak 2019

Berdasarkan Tabel 1.2 tahun 2015-2019 persentase pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat mengalami peningkatan. Dapat dilihat dari tahun 2015 sampai tahun 2017 dari 4,81 persen menjadi 5,03 persen akan tetapi pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 5,00 persen kemudian mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 5,17 persen . Meskipun ada beberapa penurunan pertumbuhan ekonomi di beberapa kabupaten dan kota seperti pada Kabupaten Kapuas hulu yaitu 4,67 persen di tahun 2015 menjadi 4,03 persen di tahun 2019 dan Kota Singkawang yaitu sebesar 6,18 di tahun 2015 menjadi 4,53 di tahun 2019. Sedangkan di Kabupaten dan Kota lainnya menunjukkan angka yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Seperti yang terjadi di Kota Pontianak yang mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 5,08 persen dan mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 4,81 persen. Proses pembangunan memerlukan pendapatan nasional yang tinggi dan pertumbuhan ekonomi yang cepat. Banyak negara syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi memang tidak cukup untuk

mengentaskan kemiskinan, namun menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Kenyataan ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi menjadi tidak berarti bagi penurunan masyarakat miskin jika tidak diiringi dengan pemerataan pendapatan (Wongdesmiwati, 2009). Kebijakan upah minimum untuk melindungi upah tenaga kerja agar tidak merosot pada tingkat upah yang rendah, akibat ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Penetapan upah minimum didasari oleh Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) pada awal tahun 1996-2006 dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) pada tahun 2007 hingga saat ini (Silalahi, 2008). Berikut ini data Upah Minim Regional di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Upah Minimum Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat 2015 - 2019

NO	KABUPATEN / KOTA	UMK 2015	UMK 2016	UMK 2017	UMK 2018	UMK 2019
1	Provinsi	1.560.000	1.739.400	1.882.900	2.046.900	2.211.500
2	Kota Pontianak	1.625.000	1.815.000	1.972.000	2.145.000	2.318.000
3	Kabupaten Mempawah	1.575.000	1.756.125	1.901.005	2.066.600	2.232.600
4	Kabupaten Landak	1.606.000	1.801.583	2.000.920	2.175.200	2.349.870
5	Kabupaten Sintang	1.600.000	1.800.000	2.025.000	2.215.000	2.393.000
6	Kabupaten Sambas	1.650.000	1.839.750	2.022.800	2.200.000	2.377.000
7	Kabupaten Ketapang	1.800.000	2.007.000	2.172.500	2.439.300	2.636.000
8	Kabupaten Kapuas Hulu	1.600.000	1.784.000	2.028.000	2.204.650	2.381.700
9	Kota Singkawang	1.650.000	1.839.750	1.991.529	2.164.991	2.338.840
10	Kabupaten Sanggau	1.635.000	1.823.025	1.973.425	2.145.310	2.318.000
11	Kabupaten Kubu Raya	1.580.000	1.761.700	1.907.040	2.075.000	2.242.000
12	Kabupaten Sekadau	1.600.000	1.784.000	1.931.180	2.099.386	2.267.970
13	Kabupaten Bengkayang	1.660.000	1.860.000	2.013.450	2.189.000	2.364.777
14	Kabupaten Melawi	1.607.000	1.800.000	1.948.500	2.118.214	2.288.306
15	Kabupaten Kayong Utara	1.765.000	1.967.975	2.130.300	2.315.850	2.501.850

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Pontianak 2019

Berdasarkan Tabel 1.3 upah minimum di Provinsi Kalimantan Barat setiap tahunnya mengalami kenaikan tingkat upah, pada tahun 2015 upah terbesar berada di Kabupaten Ketapang sebesar Rp. 1.800.000 sedangkan upah terendah terdapat pada Kabupaten Mempawah sebesar Rp. 1.575.000. Untuk keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Barat tingkat upah mengalami kenaikan secara terus menerus dari tahun 2015 hingga tahun 2019.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Pernyataan Masalah

Jika upah minimum meningkat maka daya konsumsi masyarakat akan meningkat, hal ini secara tidak langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatnya pendapatan dan pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung dapat mengurangi persentase angka kemiskinan. Penghasilan dalam hal ini adalah upah yang didapatkan setiap individu / pekerja, sehingga dapat menambah pendapatan yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan. Secara keseluruhan pendapatan per kapita yang tinggi akan berdampak pada kesejahteraan seseorang ataupun masyarakat.

1.2.2 Pertanyaan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas maka rumusan masalah yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?
2. Apakah Upah Minimum berpengaruh terhadap Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di jelaskan dan di uraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kontribusi Penelitian

Pada penelitian ini memiliki dua kontribusi penelitian, yaitu kontribusi teoritis dan kontribusi praktis sebagai berikut:

1.4.1 Kontribusi Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat di temukan gagasan-gagasan baru dari hasil penyelesaian permasalahan penelitian ini guna untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang ekonomi dan di harapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pengetahuan tentang pengaruh pertumbuhan ekonomi dan upah minimum terhadap kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4.2 Kontribusi Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari kemiskinan di Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Serta dapat dijadikan referensi atau acuan untuk membantu pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dalam mencari solusi agar Kemiskinan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat menurun.

1.5 Gambaran Kontekstual

Penelitian ini menggunakan data sekunder (*Secondary Data*) dimana data tersebut didapat dari Badan Pusat Statistik dan Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Penelitian terdahulu yang ada di Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis serta jurnal-jurnal ekonomi dan situs website. Adapun daerah yang diamati pada penelitian ini adalah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat.